



Media: Kompas

Hari: Sabtu

Tanggal: 12 April 2025

Halaman: 11

CAGAR BUDAYA

Rumah Peninggalan Belanda di Stasiun Lempuyangan Jadi Sengketa

YOGYAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 13 rumah dan 1 bangunan perkantoran di kawasan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, diperebutkan oleh PT Kereta Api Indonesia dan warga yang menempati. Kedua belah pihak menyatakan memiliki hak atas bangunan peninggalan Belanda yang dulu difungsikan sebagai perumahan karyawan perusahaan kereta api tersebut.

Sebanyak 14 bangunan itu berderet di sisi selatan Stasiun Lempuyangan, dipisahkan oleh Jalan Lempuyangan, Kelurahan Bausaran, Kota Yogyakarta. Bangunan-bangunan itu sejak puluhan tahun lalu ditinggali warga. Adapun tanahnya berstatus Sultan Ground atau milik Keraton Yogyakarta.

Sebagian halaman rumah ada yang dimanfaatkan warga untuk area parkir sepeda motor

penumpang kereta dan usaha kecil lainnya, termasuk penyewaan sepeda motor. Terdapat pula sejumlah warung makan dan usaha kaki lima.

Polemik muncul saat PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta berencana menata kawasan emplasemen Stasiun Lempuyangan yang mencakup bangunan tersebut. Sosialisasi kepada warga yang menempati 14 bangunan itu pun digelar pada 26 Maret lalu di kantor Kelurahan Bausaran.

Warga diminta mengosongkan bangunan yang diklaim sebagai aset PT KAI itu pada Mei 2025. Namun, warga menolak karena mereka juga memiliki surat keterangan tanah (SKT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Warga pun mengungkapkan

penolakan rencana PT KAI itu dengan memasang sejumlah spanduk di kawasan permukiman. Spanduk itu di antaranya berbunyi "Warga Menolak Pengusiran oleh PT KAI Tanah Ini Milik Kasultanan Ngayogyakarta" dan "Pejah Gesang Nderek Sultan" atau yang artinya "Mati Hidup Ikut Sultan".

Ketua Rukun Warga (RW) 001 Bausaran sekaligus salah satu warga yang menempati rumah, Anton Handriutomo (60), saat ditemui, Jumat (11/4/2025), menjelaskan, warga mengantongi SKT sejak 2018. "Itu memang bukan sertifikat tanah, tetapi menyatakan yang bersangkutan tinggal di situ," ujarnya.

Adapun rumah itu sudah ditempati keluarga Anton sejak 1962 ketika ayahnya menjadi

Pemerintah Kota Yogyakarta tengah melakukan upaya penelusuran terhadap alas hak bangunan yang dipersalkan tersebut.

pegawai Djawatan Kereta Api (perusahaan cikal bakal PT KAI). "Saya juga lahir di rumah ini tahun 1965 dan sampai sekarang tinggal di sini," katanya.

Rumah-rumah tersebut, menurut Anton, dibangun pada tahun 1920-an oleh perusahaan kereta api Belanda, yakni Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) dan Staatsspoorwegen (SS). Saat ini

status bangunan tersebut adalah cagar budaya.

Dia pun menyebut warga telah menemui Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pada Rabu (9/4) untuk menyampaikan persoalan tersebut. Warga kini memilih bersikap menunggu langkah lanjutan dari PT KAI.

Secara terpisah, Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih melalui keterangan tertulis menyatakan rencana penataan Stasiun Lempuyangan sebagai bentuk komitmen akan upaya pengamanan dan penjagaan aset rumah perusahaan yang tercatat dalam

akta tetap perusahaan. Ini sekaligus sebagai komitmen untuk mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang kereta api.

Feni mengungkapkan, 13 rumah dinas yang berada dalam

kawasan emplasemen Stasiun Lempuyangan itu masih tercatat sebagai aset bangunan PT KAI. Aset itu dapat dipergunakan untuk menunjang operasional kereta api.

Selain itu, Feni menyebut, tingginya volume penumpang kereta api jarak jauh dan KRL di Stasiun Lempuyangan mengharuskan dilakukan peningkatan keselamatan, pelayanan, dan kenyamanan penumpang melalui penataan. Setiap hari, stasiun itu melayani sekitar 15.000 penumpang. "Dan ini membutuhkan lahan yang memadai," katanya.

Lebih jauh Feni menjelaskan, kawasan Stasiun Lempuyangan merupakan Sultan Ground. Namun, KAI Daop 6 Yogyakarta telah diberikan kepercayaan dan izin penggunaan dan pengelolannya. KAI Daop 6 Yogyakarta juga sudah memiliki surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT).

Dia menambahkan, KAI Daop 6 Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi dan akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat ditemui, Jumat, mengatakan telah menerima pengaduan dari warga terkait persoalan itu. Dia juga telah mengecek langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran utuhnya.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Yogyakarta tengah melakukan upaya penelusuran terhadap alas hak bangunan yang dipersalkan tersebut. Permasalahannya, alas hak ini, disebut Hasto, belum bisa dibedakan atau tuntas. (ENG)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005